

LAPORAN KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN TAHUN 2025



TAHUN 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	23
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	25
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu	27
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	28
3.1.4 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	29
3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	35
3.2 Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n
- Tabel 2.1** Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis
- Tabel 2.2** Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n
- Tabel 2.3** Rencana Kinerja Tahun 2025
- Tabel 2.4** Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah
- Tabel 2.5** Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n
- Tabel 3.1** Pengkategorian Capaian Kinerja
- Tabel 3.2** Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n
- Tabel 3.3** Perbandingan Capaian Kinerja
- Tabel 3.4** Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
- Tabel 3.5** Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi
- Tabel 3.6** Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
- Tabel 3.7** Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
- Tabel 3.8** Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025
- Tabel 3.9** Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pertanian dan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2025

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan

kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2025:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penataan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua mutlak dilakukan sehingga diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua. Perubahan tersebut didasarkan atas kebutuhan dan kekhususan sesuai dengan kewenangan otonomi khusus Provinsi Papua dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Papua Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Hortikultura dan pangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

- bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan hortikultura dan pangan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

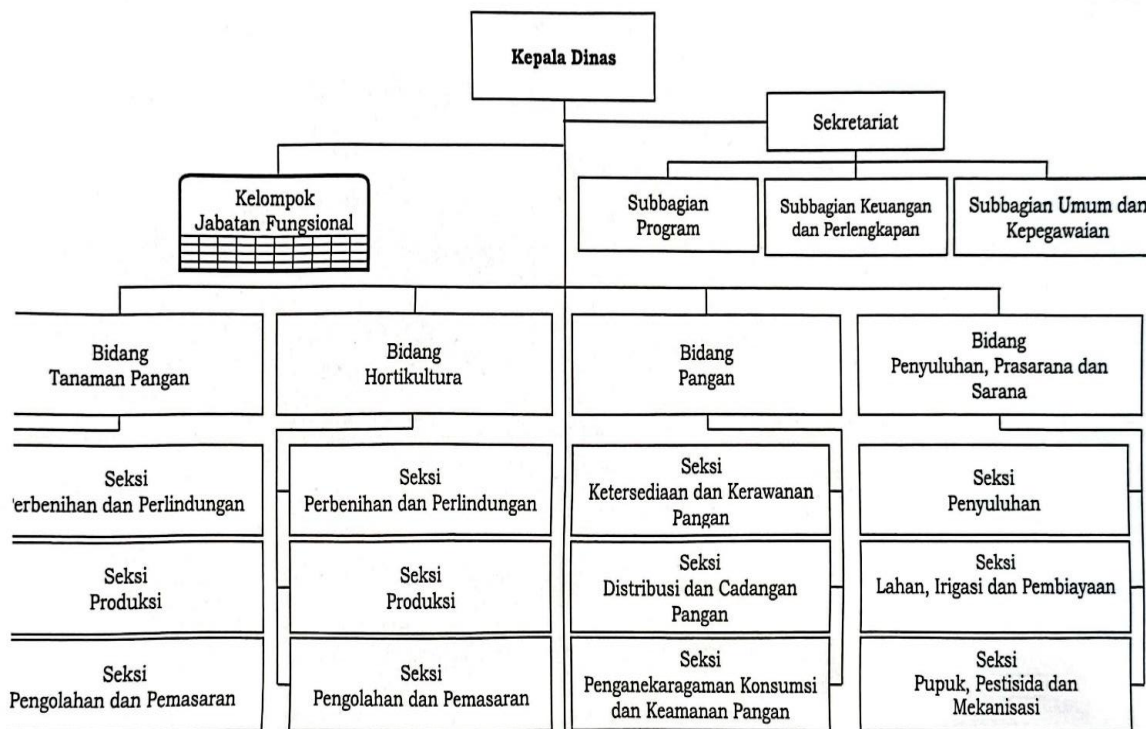
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, terdapat struktur organisasi dan tatakerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN
PROVINSI PAPUA**

Lampiran Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 23 Tahun 2024
Tanggal : 29 Januari 2024



Salin sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOFIA HONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua :

Tabel 1.1

Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
1	2	3
APBD	Tahun 2024	62.757.861.129
APBD	Tahun 2025	36.962.449.265
Dak Fisik	Tahun 2024	2.262.902.000
Dak Fisik	Tahun 2025	0

Sumber : Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66971;

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
- h. Peraturan Gubernur (PERGUB) Papua Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mendukung Visi “ **Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik** ” yang dijabarkan dalam Misi Pertama yaitu “Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM” dan Misi Keempat yaitu “Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah, menuju Papua Produktif” maka Tujuan yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026 adalah Terwujudnya Sumber Daya manusia Papua Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing dengan Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan produksi komoditas unggulan pertanian dan pangan dengan arah kebijakan peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian dan pangan.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua adalah **“Meningkatkan Pendapatan Petani”** dengan Sasaran :

1. Meningkatkan ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan dan Kemandirian pangan.
2. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas
3. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
4. Menigkatnya Ekspor Komoditas Pertanian

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua

Tabel 2.1

Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	a.	Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2	2	2
		b.	Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton	28	26	40
		c.	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/kap/hari	1.931	2,361	2,361
		d.	Angka	gram/kap/hari			

			Kecukupan Protein (AKP)		57	74,22	75
		e.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	82	85	88
		f.	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	80	83	85
2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	g.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2.00	2.50	2.75
		h.	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1.50	1.75	2.00

3.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	i.	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	63	64	65
		j.	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	75	77	79
4.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	k.	Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Dikendalikan	%	60	63	65
		l.	Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	%	75	80	85

5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	m.	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	60	225	250
		n.	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	413	420	430
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	o.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	a. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	%
		b. Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton
		c. Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/kap/hari
		d. Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kap/hari
		e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor
		f. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%
2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	g. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%
		h. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%
3.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	i. Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks
		j. Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks
4.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	k. Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Dikendalikan	%
		l. Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	%
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	m. Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
		n. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	o. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan. Berikut Rencana Kinerja Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1		2	3	4	6
1.	Meningkatkan Pendapatan Petani	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	a. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2
			b. Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton	26
			c. Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/kap/hari	2,361
			d. Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kap/hari	74,22
			e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85
			f. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	83
2.		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	g. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2.50
			h. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1.75
3.		Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	i. Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	64
			j. Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	77
4.		Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	k. Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Dikendalikan	%	63
			l. Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	%	80
5.		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	m. Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	225
			n. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	420
6.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	o. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	81

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SEMUEL SIRIWA, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAMSES LIMBONG, S.IP, M.Si
MAYJEN (Purn)
Jabatan : Pj. GUBERNUR PAPUA

Selaku Atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua



RAMSES LIMBONG, S.IP, M.Si
MAYJEN (Purn)

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua



Ir. SEMUEL SIRIWA, M.Si
NIP. 19650707 198903 1 015

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
I.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	Cakupan daerah rawan pangan	9 Kab/kota	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	866.668.000
		Penguatan cadangan pangan daerah	28 Ton	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan	716.693.000
		Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.100 Kkal/kap/hari	2. Promosi pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	149.975.000
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	57 Gr/kap/hari	Program penanganan Kerawanan pangan	149.997.000
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,8	1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	149.997.000
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	499.955.500
		1. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota	499.955.500		
II.	Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	2%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.560.109.290
		Jumlah sertifikat benih	40 Sertifikat	1. Pengawasan peredaran sarana pertanian	300.000.000
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2,50%	2. Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	2.260.109.290
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	1,50%	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.337.986.920
		Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	64 Indeks	1. Penataan prasarana pertanian	4.337.986.920
		Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	77 Indeks	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	499.999.846
		Persentase luas areal serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura yang dikendalikan	63%	1. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	499.999.846

		Persentase luas areal terdampak bencana perubahan iklim (DPI) yang dikendalikan dan ditanggulangi	80%	Program Perizinan usaha pertanian	62.000.000
				1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	62.000.000
III.	Berkembangnya sumberdaya manusia pertanian yang unggul	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	60 Orang 420 Kelompok	Program Penyuluhan Pertanian	4.502.442.895
				1. Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	3.549.999.905
				2. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	924.442.990
IV.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.149.657.629
			100%	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.715.224.629
			100%	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.631.233.000
			100%	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.100.000
			100%	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.100.000
			100%	5. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			100%	6. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	
Jumlah APBD					41.628.817.080

Jumlah Anggaran untuk keseluruhan program baik program utama maupun pendukung adalah :

No	Program/DPA	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	866.668.000	APBD
2	Program Penanganan kerawanan pangan	149.997.000	APBD
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	499.955.500	APBD
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.560.109.290	APBD
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.337.986.920	APBD
6	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	499.999.846	APBD
7	Program Perizinan Usaha Pertanian	62.000.000	APBD
8	Program Penyuluhan Pertanian	4.502.442.895	APBD
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.149.657.629	APBD
JUMLAH		41.628.817.080	

Jumlah anggaran keseluruhan program (utama dan Rutin) Rp. 41.628.817.080,-



Jayapura, Maret 2025
PIHAK PERTAMA
 Kepala Dinas Tanaman Pangan
 Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua
Ir. SEMUEL SIRIWA, M.Si
 NIP. 19650707 198903 1 015

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua :

Tabel 2.5

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	5	6	10	11	12
	1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	355,605,000	351,908,150	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah nKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	402,909,000	192,757,440	
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	208,430,880	-	
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi				
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	116,150,000	116,150,000	

	2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
	2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	85,668,000	85,668,000	
	3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
	3 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	415,993,000	415,836,750	
	4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Asn	23,741,342,133	23,661,562,783	
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30,530,000	30,496,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	36,050,000	36,050,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material yang disediakan	103,950,000	103,900,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558,895,000	552,545,857	

	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	360,000,000	352,820,437	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	82,100,000	82,040,000	
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	361,100,000	350,576,500	
	5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN				
	8 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	275,893,000	273,153,032	
	9 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	413,809,245	358,039,924	
	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih unggul ber sertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga	1,553,520,825	1,520,368,983	
	6 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	10 Penataan Prasarana Pertanian				
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	186,219,805	186,059,320	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	125,096,000	124,924,858	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian yang termanfaatkan	4,004,933,580	3,678,380,315	

	7 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
	11 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	414,192,046	413,951,616	
	8 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
	12 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	62,000,000	62,000,000	
	9 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
	13 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				
	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	2,418,090,000	2,367,722,000	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	705,891,175	702,619,300	
	14 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan	945,212,875	942,918,000	
	Jumlah		37,963,581,564	36,962,449,265	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1,1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
				2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	a. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2	1	50	Sangat Rendah	
		b. Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton	26	2	8	Sangat Rendah	
		c. Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/kap/hari	2.361	2.490	105	Sangat Tinggi	
		d. Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kap/hari	74.22	69.51	94	Sangat Tinggi	
		e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85	81.90	96	Sangat Tinggi	
		f. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	50	30	60	Rendah	
2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	g. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2.50	2.50	100	Sangat Tinggi	
		h. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1.75	1.75	100	Sangat Tinggi	
3.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	i. Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	64	64	100	Sangat Tinggi	
		j. Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	77	77	100	Sangat Tinggi	
4.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	k. Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang	%	63	63	100	Sangat Tinggi	
		l. Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	%	80	-	-		
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	m. Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	225	24	11	Sangat Rendah	
		n. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	420	25	6	Sangat Rendah	
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	o. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	81	81	100	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Tahun 2025		
				2024	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	a. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	1	2	1	50
		b. Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton	31,29	26	2	8
		c. Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/kap/hari	2,361	2,361	2,490	105
		d. Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kap/hari	74	74	70	94
		e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	80,3	85	82	96
		f. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	80	50	30	60
2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	g. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2.00	2.50	2.50	100
		h. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1,5	1.75	1.75	100
3.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	i. Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	63	64	64	100
		j. Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	75	77	77	100
4.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	k. Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Dikendalikan	%	60	63	63	100
		l. Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	%	75	-	-	
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	m. Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	16	225	24	11
		n. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	33	420	25	6
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	o. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	100

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir	Tingkat
			2025	Rencana Strategis	Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	a. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	1	1	100
		b. Penguatan Cadangan Pangan Daerah	2	2	100
		c. Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.490	2.520	99
		d. Angka Kecukupan Protein (AKP)	70	71	98
		e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82	83	99
		f. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	30	30	100
		g. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2.50	2.60	96
2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	h. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	1.75	1.78	98
		i. Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	64	65	98
3.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	j. Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	77	79	97
		k. Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Dikendalikan	63	65	97
4.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	l. Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	-	50	-
		m. Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	24	40	60
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	n. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	25	30	83
		o. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	A	A	A
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua				

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hasil pengukuran ini dapat menggambarkan keberhasilan dan ataupun kegagalan suatu kegiatan serta untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi dan tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan misi yang diamanatkan masyarakat Provinsi Papua. Pengukuran Kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai pencapaian kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator – indikator pengukuran yang disepakati. Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan di dalam dokumen Persetujuan Kinerja.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing – masing kelompok indikator, yaitu kelompok indikator kinerja input, output, dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen Persetujuan Kinerja dengan realisasinya, atau rencana kinerja (Performance plans) yang dicapai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance gaps) karena analisis berbeda dengan yang direncanakan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Analisis keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	a. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	2	1	50	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	
		b. Penguatan Cadangan Pangan Daerah	26	2	8	Menurunnya Cadangan Pangan Daerah	
		c. Angka Kecukupan Energi (AKE)	2,361	2,490	105	Meningkatnya Angkat Kecukupan Energi	
		d. Angka Kecukupan Protein (AKP)	74	70	94	Meningkatnya Angka Kecukupan Protein	
		e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	82	96	Meningkatnya Ketahanan Pangan daerah dengan tercapainya Skor Pola Pangan Harapan	
		f. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	50	30	60	Menurunnya pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan	
2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	g. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2.50	2.50	100	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	
		h. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	1.75	1.75	100	Meningkatnya Produksi Hortikultura	
3.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	i. Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	64	64	100	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian	
		j. Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	77	77	100		
4.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	k. Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Dikendalikan	63	63	100	Meningkatnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	
		l. Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	80	-	-		
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	m. Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	225	24	11	Menurunnya Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani yang mendapatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan	
		n. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	420	25	6		
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan,	o. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	A	A	100		

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa adanya penurunan daerah rentan rawan pangan dan penigkatan pada angka kecukupan energi dan protein, serta peningkatan pada produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan adanya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Papua dan APBN.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	2	1	50	1,584,755,880	1,162,320,340	73	
		26	2	8				
		2,361	2,490	105				
		74.22	69.51	94				
		85	81.90	96				
		50	30	60				
2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	2.50	2.50	100	5,972,263,650	5,556,789,222	93	
		1.75	1.75	100				
3.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	64	64	100	649,208,805	646,137,210	100	
		77	77	100				
4.	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	63	63	100	414,192,046	413,951,616	100	
		80	-	-				
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	225	24	11	4,059,194,050	4,013,259,350	99	
		420	25	6				
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	A	A	A	25,273,967,133	25,169,991,577	100	

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/kegiatan	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	a. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	50	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	100	Menunjang	Pasar Murah, cadangan pangan pemerintah, informasi harga pangan, pengembangan produk pangan lokal, peningkatan produksi pangan, melakukan promosi, edukasi dan sosialisasi pangan lokal
		b. Penguatan Cadangan Pangan Daerah	8	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
		c. Angka Kecukupan Energi (AKE)	105	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			
		d. Angka Kecukupan Protein (AKP)	94				
		e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	96	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	100	Menunjang	Penigkatan ketersediaan dan mutu keanekaragaman pangan
		f. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	60	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	Monitoring pengujian bahan pangan menggunakan rapat test dan laboratorium, pemantauan dan pengawasan penggunaan pestisida, pengawasan terhadap label pangan

2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	g. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	100	Menunjang	Masyarakat petani dapat memperoleh bibit yang berkualitas, bersertifikat, pupuk, pestisida dan alsintan yang tersedia
		h. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Penataan Prasarana Pertanian	100	Menunjang	
3.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	i. Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	100	Menunjang	Pelaku usaha dapat memperoleh ijin usaha pertanian
		j. Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Penataan Prasarana Pertanian PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
4.	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	k. Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Dikendalikan	100	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100	Menunjang	Pengendalian hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura melalui Agens Pengendali hayati
		l. Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			

5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	m. Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	11	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	100	Menunjang	Penyuluh Pertanian dan petani memperoleh pembinaan dan peningkatan kapasitas
		n. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	o. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100	Menunjang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kegiatan Tahun 2025 adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah berupa :
 1. Beras Komersil 2.000 Kg
 2. Gula Pasir 1.800 Kg
 3. Minyak Goreng 3.200 liter
 4. Telur 1.800 Rak
 - Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, berupa honor penjaga kios cenderawasih dan belanja natura dan pangan lainnya
 - b. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
 - Sub kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal berupa kegiatan Promosi pola makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui Banner B2SA, Leaflet B2SA, dan kalender B2SA.

B2SA sangat bermanfaat untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat luas di Provinsi Papua terutama di daerah lokasi prevalensi stunting dan lokasi dampak rawan pangan agar masyarakat luas bisa sadar untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) sehingga generasi muda kedepan bisa tumbuh sehat, kuat dan produktif.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - Sub kegiatan Pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi adalah Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. FSVA Provinsi menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih

rentan, sehingga program dari berbagai sektor, seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan serta ketahanan pangan dan gizi masyarakat di tingkat kecamatan.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan adalah Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan untuk mengetahui kandungan cemaran bahan kimia pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Pengujian yang dilakukan mengacu pada perbadan No.10 Tahun 2025..

4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung lainnya, kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi, Bantuan pestisida, handsprayer dan cultivator kepada petani.

b. Kegiatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

- Sub Kegiatan Pengelolaan Penertiban Sertifikat Benih, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura sehingga jika lulus uji maka diterbitkan sertifikat .
- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan, kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan penyediaan benih atau bibit tanaman pangan dan hortikultura unggul bersertifikat yang terawsai, tersedia dan beredar yang memenuhi standart mutu yang ditetapkan yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga.

5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan pupuk organik/kompos dan cultivator kepada petani di kabupaten jayapura dan kabupaten sarmi
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di tingkat Usaha Tani, Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan rehab jaringan irigasi tersier (RJIT) di 5 (lima) Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian, kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan keladi 60 ha di 6 kab/kota, Pengembangan Padi 50 Ha di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi, Penangkaran Padi 3 Ha, Pengembangan Jagung 25 Ha, Pengembangan Cabai 80 Ha di 4 kab/kota, Pengembangan

Bawang Merah 5 Ha di 3 kabupaten/kota, Gerakan Tanam Cabai sebanyak 18.000 dan Pemberian Bantuan alat pertanian kepada petani.

6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

- Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pembinaan Klinik PHT kepada petani/kelompok tani serta kepada Klinik PHT, pemantauan dan edukasi tentang cara yang tepat dalam pembuatan Agens Pengendalian Hayati (APH) Trichoderma dan PGPR dan Mengendalikan OPT menggunakan bahan pengendalian yang ramah lingkungan dan aman bagi mahluk hidup atau agens pengendali hayati (APH) serta penggunaan pestisida nabati yang tepat sasaran dengan dosis yang tepat sesuai dengan peruntukan pada tanaman yang paling banyak dibudidayakan oleh petani dan merupakan tanaman yang sering di konsumsi oleh masyarakat.

7. Program Perizinan Usaha Pertanian

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standart dan Izin Usaha Pertanian, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembinaan kepada kelompok atau petugas dinas yang membidangi fungsi perizinan usaha hasil pertanian di kabupaten kota tentang proses perizinan usaha pertanian untuk mendorong dan mempercepat dalam aspek pendanaan.

8. Program Penyuluhan Pertanian

a. Kegiatan Pengembangan ketenagaan Penyuluhan Pertanian

- Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan makan minum kepada siswa siswi sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian.
- Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian, kegiatan yang dilaksanakan adalah Diklat Teknis Budidaya Cabe bagi Penyuluh Pertanian, Peserta berasal dari Kabupaten, Biak Numfor , Supiori, Waropen, Kepulauan Yapen, Keerom, Jayapura dan Kota Jayapura dengan jumlah peserta 24 Orang, Diklat Teknis Budidaya Cabe Bagi Petani, Peserta berasal dari Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Sarmi, Keerom dan Kota Jayapura dengan jumlah peserta 25 orang, dan Diklat Sertifikasi Benih Padi, Jagung dan Kedelai (PAJALE) bagi Penyuluh, Petugas dan Petani peserta berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dengan Jumlah Peserta 13 Orang

- b. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani, kegiatan yang dilaksanakan adalah Bantuan Sarana Produksi Demplot Pengembangan Cabai kepada Kelompok Petani yang mendapatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan sebanyak 10 kelompok.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Laporan Realisasi Anggaran Per Rekening Jenis Tahun 2025
 SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua
 Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
		Operasi		Modal		Tak Terduga	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1	2	3	4	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.584.755.880,00	1.162.320.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.584.755.880,00	1.162.320.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000			0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.01.01.0012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.01.01.0024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.01.01.0025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.01.01.0026	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.01.01.0029	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.01.01.0045	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.02.01.0031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.02.01.0062	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.02.04.0037	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02.04.01.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.01.01.0012	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	600.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	87.390.000	10.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	202.400.000	140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	200.400.000	140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	126.000.000	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14.400.000	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	60.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000	36.798.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.700.000	36.798.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.700.000	36.798.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	208.430.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.430.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.01	Belanja Barang	56.610.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	56.610.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.610.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.02	Belanja Jasa	104.220.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	10.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	54.620.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	15.420.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	29.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	9.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.250.000	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.000.000	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.000.000	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Juma/Surat Kabar/Majalah	2.000.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.500.000	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.500.000	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	85.668.000,00	85.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	85.668.000,00	85.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003		Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	85.668.000,00	85.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.668.000	85.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	10.025.000	10.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.025.000	10.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.675.000	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.350.000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	20.400.000	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.400.000	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	55.243.000	55.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.243.000	55.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.500.000	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0003	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	15.743.000	15.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	415.993.000,00	415.836.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1				2	3	4	5	6	7	8
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	40.000.000	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.02	Belanja Jasa	16.300.000	16.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.300.000	16.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	4.900.000	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	10.000.000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.400.000	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	273.700.000	273.604.750,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	273.700.000	273.604.750,00	0,00	0,00	0,00	0,
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273.700.000	273.604.750,00	0,00	0,00	0,00	0,
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	35.755.173.609,00	35.185.135.406,00	623.652.075,00	614.993.519,00	0,00	0,
3.27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	35.755.173.609,00	35.185.135.406,00	623.652.075,00	614.993.519,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN	35.755.173.609,00	35.185.135.406,00	623.652.075,00	614.993.519,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.273.967.133,00	25.169.991.577,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.741.342.133,00	23.661.562.783,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.741.342.133,00	23.661.562.783,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	23.741.342.133	23.661.562.783,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.741.342.133	23.661.562.783,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	16.977.217.422	16.954.810.212,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	16.580.729.040	16.558.992.840,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	396.488.382	395.817.372,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.339.989.132	1.332.556.473,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.325.229.032	1.321.310.172,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.760.100	11.246.301,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	241.020.000	239.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	241.020.000	239.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	220.017.000	217.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	220.017.000	217.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	744.923.100	740.289.583,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	717.025.000	712.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	27.898.100	27.714.583,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.421.712.056	1.417.120.608,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.391.112.156	1.387.015.044,00	0,00	0,00	0,00	0,

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1				2	3	4	5	6	7	8
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	721.350.185	717.462.782,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	28.329.600	16.591.193,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	42.511.500	34.785.744,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	41.558.300	33.972.926,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	953.200	812.818,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	107.933.807	104.369.526,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	105.054.384	101.919.483,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.879.423	2.450.043,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	1.701.552.359	1.696.052.359,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	1.701.552.359	1.696.052.359,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	729.425.000,00	722.991.857,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.530.000,00	30.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.530.000	30.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	30.530.000	30.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.530.000	30.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.905.000	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.000.000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.625.000	17.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.050.000,00	36.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.050.000	36.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	36.050.000	36.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.050.000	36.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.050.000	36.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	103.950.000,00	103.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.950.000	103.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0007	5.1.02.01	Belanja Barang	103.950.000	103.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0007	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	103.950.000	103.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0007	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.950.000	103.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558.895.000,00	552.545.857,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.895.000	552.545.857,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	558.895.000	552.545.857,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	558.895.000	552.545.857,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	262.200.000	262.131.490,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	296.695.000	290.414.367,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.100.000,00	434.860.437,00	0,00	0,00	0,00	0,

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1				2	3	4	5	6	7	8
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	12.000.000	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0003	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.000.000	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0003	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	70.100.000	70.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0003	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.100.000	70.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0003	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0003	5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36.000.000	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0003	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000	21.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.100.000,00	350.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.100.000,00	350.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.100.000	350.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	323.600.000	323.536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	323.600.000	323.536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0002	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	323.600.000	323.536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	37.500.000	27.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.500.000	27.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0002	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	37.500.000	27.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.892.137.120,00	1.803.778.840,00	351.085.950,00	347.783.099,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	275.893.000,00	273.153.032,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	275.893.000,00	273.153.032,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.893.000	273.153.032,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	170.918.000	168.894.262,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	170.918.000	168.894.262,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	15.595.000	15.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.077.000	4.067.880,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	60.990.000	59.848.782,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.156.000	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	70.000.000	69.219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1				2	3	4	5	6	7	8
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.950.000	92.938.370,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.950.000	92.938.370,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.616.244.120,00	1.530.625.808,00	351.085.950,00	347.783.099,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	208.609.245,00	154.134.700,00	205.200.000,00	203.905.224,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.609.245	154.134.700,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	78.959.245	56.753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	78.959.245	56.753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	11.292.010	11.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.900.000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	6.354.920	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.057.415	3.055.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.920.000	3.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.779.500	10.779.400,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.123.000	1.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.532.400	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	15.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	51.550.000	31.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.350.000	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	32.400.000	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	11.950.000	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.200.000	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.200.000	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.100.000	65.580.800,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.100.000	65.580.800,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.100.000	65.580.800,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	75.600.000,00	75.411.624,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	75.600.000,00	75.411.624,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	75.600.000,00	75.411.624,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	75.600.000,00	75.411.624,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	129.600.000,00	128.493.600,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	129.600.000,00	128.493.600,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	129.600.000,00	128.493.600,00	0,00	0,

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1				2	3	4	5	6	7	8
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	32.780.000	32.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.375.000	5.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.146.000	3.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.035.000	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.000.000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.914.000	4.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.875.000	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	91.683.500	89.108.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.750.000	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	145.000.000	144.534.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	6.000.000	5.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.600.000	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.02	Belanja Jasa	610.845.000	592.092.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	208.445.000	203.159.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	165.000.000	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.000.000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	36.365.000	31.079.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.080.000	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	400.000.000	386.532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	400.000.000	386.532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.400.000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.400.000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.000.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.000.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	202.593.000	194.441.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	202.593.000	194.441.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181.600.000	181.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	20.993.000	12.841.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	145.885.950,00	143.877.875,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1				2	3	4	5	6	7	8
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	74.750.000,00	72.888.150,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	65.250.000,00	65.172.750,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	65.250.000,00	65.172.750,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	9.500.000,00	7.715.400,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	9.500.000,00	7.715.400,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.095.355.635,00	3.770.139.793,00	220.893.750,00	219.224.700,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian	4.095.355.635,00	3.770.139.793,00	220.893.750,00	219.224.700,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	186.219.805,00	186.059.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.219.805	186.059.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	146.119.805	145.959.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	146.119.805	145.959.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	69.900.000	69.743.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	849.805	849.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.120.000	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	70.000.000	69.996.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.100.000	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.100.000	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.100.000	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	125.096.000,00	124.924.858,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.096.000	124.924.858,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	87.096.000	86.924.858,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.096.000	86.924.858,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.060.000	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	649.000	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0004	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.087.000	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0004	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	900.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1				2	3	4	5	6	7	8
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.849.274.830	2.686.705.115,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	723.473.125	634.846.748,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.590.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	899.240.000	887.269.200,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	64.575.000	29.153.539,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	26.933.865	23.272.593,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.895.000	3.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.680.000	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.637.500	12.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.500.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.026.840	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	814.427.500	813.042.880,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	264.496.000	262.082.655,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.02	Belanja Jasa	246.200.000	186.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	130.700.000	118.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	118.200.000	118.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	12.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	115.500.000	68.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.02.04.0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	112.500.000	68.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	688.565.000	585.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	688.565.000	585.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	584.400.000	531.971.500,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	94.165.000	53.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	220.893.750,00	219.224.700,00	0,00	0,

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1				2	3	4	5	6	7	8
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	374.192.046,00	373.957.896,00	40.000.000,00	39.993.720,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.192.046	373.957.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	284.192.046	283.957.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	284.192.046	283.957.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	55.112.646	55.112.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	48.285.000	48.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.919.400	4.919.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.050.000	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.325.000	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	151.750.000	151.515.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.000.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.000.000	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.000.000	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	40.000.000,00	39.993.720,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	40.000.000,00	39.993.720,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	40.000.000,00	39.993.720,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	40.000.000,00	39.993.720,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	37.500.000	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.500.000	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.555.000	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	800.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.190.000	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	450.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1				2	3	4	5	6	7	8
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.500.000	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.500.000	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.057.521.675,00	4.005.267.300,00	11.672.375,00	7.992.000,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.112.308.800,00	3.062.349.300,00	11.672.375,00	7.992.000,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003		Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	2.415.750.000,00	2.367.722.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.415.750.000	2.367.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	2.383.000.000	2.336.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.383.000.000	2.336.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.500.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.500.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	15.000.000	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	23.000.000	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.340.000.000	2.293.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.750.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.750.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.750.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.000.000	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.000.000	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0003	5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	696.558.800,00	694.627.300,00	9.332.375,00	7.992.000,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.558.800	694.627.300,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	223.258.800	221.378.030,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	223.258.800	221.378.030,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	20.097.000	18.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	23.825.000	23.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	23.738.000	23.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.294.200	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.564.600	14.529.030,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.080.000	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								
		Operasi		Modal		Tak Terduga				
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.000.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	252.000.000	252.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	176.500.000	176.449.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	176.500.000	176.449.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	176.500.000	176.449.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	9.332.375,00	7.992.000,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	1.332.375,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0,00	1.332.375,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0	0,00	1.332.375,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	8.000.000,00	7.992.000,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	8.000.000,00	7.992.000,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	8.000.000,00	7.992.000,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	945.212.875,00	942.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	945.212.875,00	942.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.212.875	942.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	571.683.875	569.903.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	571.683.875	569.903.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24.480.000	24.479.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	96.019.375	96.019.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	19.500.000	19.471.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	84.940.000	84.939.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	50.640.000	49.929.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.000.000	24.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.694.500	12.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	185.500.000	185.462.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	47.910.000	46.949.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
					Operasi		Modal		Tak Terduga	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisa
1				2	3	4	5	6	7	8
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	252.679.000	252.264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	252.679.000	252.264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	201.800.000	201.385.900,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	50.879.000	50.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
				Jumlah	37.339.929.489,00	36.347.455.746,00	623.652.075,00	614.993.519,00	0,00	0,

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan pangan provinsi papua tahun 2025 mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 37.963.581.564,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 36.962.449.265,- atau 97 %. realiasasi anggaran. Anggaran tersebut berada pada 9 program, 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang di laksanakan di 9 kabupaten/kota di Provinsi papua. Dengan disusunnya matriks LKPJ ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menilai kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan, sekaligus menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya Manusia yang ada di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan saat ini berjumlah 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) orang tenaga struktural terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 7 (t u j u h) o r a n g K e p a l a U P T D , 33 (tiga puluh tiga) orang Kasubbag/kepala seksi, sisanya pejabat fungsional arsiparis sebanyak 2 (dua) orang , dan fungsional umum sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) orang .

Tabel 3. 8
Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Strategis Sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	100	1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
	Penguatan Cadangan Pangan Daerah		1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan							
	Angka Kecukupan Energi (AKE)		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	LAPORAN	1	1	355,605,000	351,908,150	98.960406
	Angka Kecukupan Protein (AKP)		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah nKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	LAPORAN	1	1	402,909,000	192,757,440	47.841433
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	LAPORAN	1	1	208,430,880	-	0

	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan		2 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi							
			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	LAPORAN	1	1	116,150,000	116,150,000	100
			2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
			3 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi							
			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	1	85,668,000	85,668,000	100
			3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
			4 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	sertifikat	50		415,993,000	415,836,750	99.962439

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	100	4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Asn	Bulan	342 orang	342 orang	23,741,342,133	23,661,562,783	99.663964
			6 Administrasi Umum Perangkat Daerah							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	30,530,000	30,496,000	99.888634
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	36,050,000	36,050,000	100
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	1	103,950,000	103,900,000	99.9519
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	35	35	558,895,000	552,545,857	98.863983
			7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	LAPORAN	12	12	360,000,000	352,820,437	98.005677
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	LAPORAN	12	12	82,100,000	82,040,000	99.926918

			8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	361,100,000	350,576,500	97.08571
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100	5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura		9 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian							
Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	100	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	275,893,000	273,153,032	99.006873
	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan		10 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	35		413,809,245	358,039,924	86.52294
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga	Laporan	3	3	1,553,520,825	1,520,368,983	97.866019

			6 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
			11 Penataan Prasarana Pertanian							
			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	1	186,219,805	186,059,320	99.91382
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	1	1	125,096,000	124,924,858	99.863191
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian yang termanfaatkan	Ha	248		4,004,933,580	3,678,380,315	91.846225
			7 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Dikendalikan	100	12 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi							
	Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	50		414,192,046	413,951,616	99.941952

			8 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							
			13 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	LAPORAN	1	1	62,000,000	62,000,000	100
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100	9 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		14 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian							
			Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	2	2	2,418,090,000	2,367,722,000	97.917034
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	75	75	705,891,175	702,619,300	99.53649
			15 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian							
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan	kelompok	5	5	945,212,875	942,918,000	99.757211
			Jumlah					37,963,581,564	36,962,449,265	

Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan tahun 2025 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua, baik yang dialokasikan dalam anggaran pembangunan maupun anggaran rutin sebagai penunjang.

Adapun Data keuangan OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua (Perbandingan Jumlah Anggaran dengan Realisasi Belanja) untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3.9
Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pertanian dan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN										
				1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
				1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan									
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	LAPORAN	1	1	355,605,000	351,908,150			

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	LAPORAN	1	1	402,909,000	192,757,440			
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	LAPORAN	1	1	208,430,880	-	Tidak dilaksanakan dikarenakan anggaran tidak tersedia		
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi									
				Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	LAPORAN	1	1	116,150,000	116,150,000			
				2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									
				2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi									
				Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	1	85,668,000	85,668,000			

				3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									
				3 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
				Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	sertifikat	50	30	415,993,000	415,836,750			
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN											
				4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
				4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Asn	Bulan	342 orang	342 orang	23,741,342,133	23,661,562,783			

				5 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	30,530,000	30,496,000			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	36,050,000	36,050,000			
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	1	103,950,000	103,900,000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	35	35	558,895,000	552,545,857			
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	LAPORAN	12	12	360,000,000	352,820,437			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	LAPORAN	12	12	82,100,000	82,040,000			

				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasioanl atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	361,100,000	350,576,500			
				5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN									
				8 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian									
				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	275,893,000	273,153,032			
				9 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman									
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	35	35	413,809,245	358,039,924			
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih unggul ber sertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga	Laporan	3	3	1,553,520,825	1,520,368,983			

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025 memiliki 6 (enam) sasaran strategis dan semua sasaran strategis tercapai.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian seperti Excavator Besar, Traktor Besar, Cultivator dan corn sheller dan alat pengolahan lahan lainnya karena perluasan lahan pertanian di Provinsi Papua melalui pembukaan areal baru mutlak memerlukan alat dan mesin pertanian dan juga pengadaan alat pasca panen mengingat kecenderungan penurunan jumlah tenaga kerja di sector pertanian.
2. Pengadaan Pupuk Organik dan Anorganik
Kedepannya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan perlu mengusulkan kegiatan pemberian bantuan pupuk organik dan anorganik karena ekonomi petani masih sangat lemah sehingga masih bercocok tanam seadanya tanpa dukungan pemupukan yang berimbang.
3. Pengadaan Bibit/Benih Unggul
Lebih ditingkatkan lagi pengadaan bibit/benih untuk komoditi tanaman pangan dan hortikultura sehingga produksi dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan.
4. Pencetakan Sawah Baru
Salah satu cara yang paling cepat dalam peningkatan produksi padi adalah membuka atau mencetak areal sawah baru karena sampai dengan sekarang luas sawah di daerah ini tidak bertambah malah cenderung berkurang yang disebabkan adanya peralihan sawah ke permukiman penduduk.
5. Peningkatan Penyuluhan
Peningkatan Penyuluhan oleh Balai Latihan Pertanian agar lebih ditingkatkan lagi, dan perlu kerja keras dalam mengubah mindset petani agar menjadi petani yang profesional dan melek teknologi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Jayapura, 03 Februari 2026

Kepala Dinas

LUNANKA V.M.L. DAIMBOA, SP., MM.
PENATA TK I
NIP. 19730927 199903 2 006

LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN

Alamat Kantor Dinas-Dinas Otonom Provinsi Papua Gedung B Lantai 3 Jl. Raya Kotaraja Jayapura
Telepon (0967) 583158 Faks (0967) 588271, 585501
E-mail : pertanian.papua@gmail.com <http://pertanian.papua.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA

NOMOR : 152b/050/A/03/2024

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.
 - b. bahwa sehubungan dengan masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua berakhir pada Tahun 2023, maka Provinsi Papua menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Tahun 2024-2026
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang No. 16 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/ 11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Gubernur (PERGUB) Papua Nomor 33 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : IKU Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2024 masa berakhirnya RPJMD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.

Ditetapkan : di Jayapura
Pada tanggal : 18 Maret 2024

KEPALA DINAS

Ir. SEMUEL SIRIWA.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650707 198903 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024 - 2026

- 1. Instansi** : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua
- 2. Tugas Pokok dan Fungsi** : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 18 Tahun 2023, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua (PERGUB) No.23 Tahun 2024, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.

Berdasarkan PERGUB tersebut, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pangan;
- c. Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan;
- d. Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang hortikultura;
- e. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pangan;
- f. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan, sarana dan prasarana
- g. Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kebudayaan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pangan;
- i. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan

Nomor :

Tanggal :

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua 2024 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	a. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2	2	2
		b. Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton	28	26	40
		c. Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/kap/hari	1.931	2,361	2,361
		d. Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kap/hari	57	74,22	75
		e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	82	85	88
		f. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	80	83	85
2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	g. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2.00	2.50	2.75
		h. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1.50	1.75	2.00
3.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	i. Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	63	64	65
		j. Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	75	77	79

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4.	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	k. Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Dikendalikan	%	60	63	65
		l. Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	%	75	80	85
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	m. Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	60	225	250
		n. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	413	420	430
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	o. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	80	81	82

Jayapura, 18 Maret 2024

Kepala Dinas,



Ir. SEMUEL SIRIWA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650707 198903 1 015

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SEMUEL SIRIWA, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAMSES LIMBONG, S.IP, M.Si
MAYJEN (Purn)
Jabatan : Pj. GUBERNUR PAPUA

Selaku Atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua



RAMSES LIMBONG, S.IP, M.Si
MAYJEN (Purn)

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua



Ir. SEMUEL SIRIWA, M.Si
NIP. 19650707 198903 1 015

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
I.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	Cakupan daerah rawan pangan	9 Kab/kota	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	866.668.000
		Penguatan cadangan pangan daerah	28 Ton	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan	716.693.000
		Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.100 Kkal/kap/hari	2. Promosi pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	149.975.000
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	57 Gr/kap/hari	Program penanganan Kerawanan pangan	149.997.000
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,8	1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	149.997.000
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	499.955.500
		1. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota	499.955.500		
II.	Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	2%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.560.109.290
		Jumlah sertifikat benih	40 Sertifikat	1. Pengawasan peredaran sarana pertanian	300.000.000
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2,50%	2. Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	2.260.109.290
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	1,50%	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.337.986.920
		Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	64 Indeks	1. Penataan prasarana pertanian	4.337.986.920
		Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	77 Indeks	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	499.999.846
		Persentase luas areal serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura yang dikendalikan	63%	1. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	499.999.846

		Persentase luas areal terdampak bencana perubahan iklim (DPI) yang dikendalikan dan ditanggulangi	80%	Program Perizinan usaha pertanian	62.000.000
				1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	62.000.000
III.	Berkembangnya sumberdaya manusia pertanian yang unggul	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	60 Orang 420 Kelompok	Program Penyuluhan Pertanian	4.502.442.895
				1. Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	3.549.999.905
				2. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	952.442.990
IV.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.149.657.629
			100%	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.715.224.629
			100%	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.631.233.000
			100%	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.100.000
			100%	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.100.000
			100%	5. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			100%	6. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	
			Jumlah APBD		41.628.817.080

Jumlah Anggaran untuk keseluruhan program baik program utama maupun pendukung adalah :

No	Program/DPA	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	866.668.000	APBD
2	Program Penanganan kerawanan pangan	149.997.000	APBD
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	499.955.500	APBD
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.560.109.290	APBD
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.337.986.920	APBD
6	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	499.999.846	APBD
7	Program Perizinan Usaha Pertanian	62.000.000	APBD
8	Program Penyuluhan Pertanian	4.502.442.895	APBD
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.149.657.629	APBD
JUMLAH		41.628.817.080	

Jumlah anggaran keseluruhan program (utama dan Rutin) **Rp. 41.628.817.080,-**

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA
Gubernur Papua

RAMSES LIMBONG, S.IP, M.SI
MAYJEN (Purn)

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua

Ir. SEMUEL SIRIWA, M.SI
NIP. 19650707 198903 1 015

